

**UPAYA DIPLOMASI JEPANG DALAM MENYELESAIKAN ISU
COMFORT WOMEN DI KOREA SELATAN**

Rossi Indrakorniawan

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Email: rossiindrakorniawan49@gmail.com

Ghifarul Madilla

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Email: ghifarulmadilla@gmail.com

Kanugrahayuning Bethari

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Email: rarabtr@gmail.com

Ajeng Kenya

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Email: ajengkenya15@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini akan membahas Upaya Diplomasi Jepang dalam Menyelesaikan Isu *Comfort Women*. Setelah kekalahan Jepang dalam perang, Jepang berfokus mengembangkan perekonomian dan menjalin kerjasama dengan banyak negara dan Korea Selatan adalah salah satu tujuan kerjasama. Namun ditengah pemulihan hubungan setelah penjajahan, isu *Comfort Women* muncul dan menghambat hubungan. Sehingga Jepang melakukan upaya agar tetap berhubungan baik dengan pihak Korea Selatan. Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana upaya Jepang dalam menangani isu *Comfort Women*. Penelitian ini akan menjelaskan mulai dari tinjauan *Comfort Women*, usaha Jepang dalam mengatasi isu, respon Korea Selatan terhadap upaya Jepang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kedua negara cukup sulit untuk berdamai. Negara terkait Isu *Comfort Women*. Dapat dikatakan bahwa diplomasi yang dilakukan oleh Jepang belum berhasil dan hubungan yang terjalin cenderung kearah negatif Korea Selatan menganggap Jepang belum tulus melakukan permohonan maaf. Selain itu, terdapat tuntutan Korea kepada Jepang untuk memberikan kompensasi kepada setiap korban.

Demikian dibuat *Irreversible Agreement* yang disebut *Agreement on Comfort Women*. Namun hal itu masih belum dapat menyelesaikan kasus *Comfort Women*.

Kata kunci: *Comfort Women, Jepang, Korea Selatan*

Abstract

This research will discuss Japan's Diplomacy Efforts in Resolving Comfort Women Issues. After Japan's defeat in the war, Japan focused on developing its economy and establishing cooperation with many countries and South Korea is one of the goals of cooperation. However, in the midst of restoring relations after colonialism, the issue of Comfort Women arose and hindered relations. So that Japan is making efforts to maintain good relations with the South Korean side. In this study, we will discuss how Japan's efforts to deal with the issue of Comfort Women. This research will explain starting from the review of Comfort Women, Japan's efforts to overcome the issue, South Korea's response to Japan's efforts. The method used in this research is to use a case study. The results of this study found that it was quite difficult for the two countries to make peace. Countries related to the Issue of Comfort Women. It can be said that the diplomacy carried out by Japan has not been successful and the relations that have been established tend to be negative. South Korea thinks that Japan has not sincerely apologized. In addition, there are Korean demands for Japan to provide compensation to each victim. Thus an irreversible agreement was made called the Agreement on Comfort Women. However, this still cannot resolve the Comfort Women case.

Keywords: Comfort Women, Japan, South Korea

PENDAHULUAN

Jepang merupakan negara yang melakukan politik demarkasi pada tahun 1940an hingga pecah perang dunia II yang berakhir tahun 1945. Adanya perang dunia II dan kekalahan Jepang pada perang tersebut membuat adanya perubahan kebijakan. Setelah kekalahan, membuat Jepang menjadi negara pasifis dan berupaya membangun hubungan baik kembali pada negara – negara sekitar yang juga bekas jajahan. Salah satunya adalah Korea selatan yang pernah menjadi bekas penjajahan Jepang. Penjajahan Korea selatan masih membekas bagi masyarakat. Tindakan penindasan serta penundukan yang dilakukan oleh Jepang sangat tidak manusiawi. Salah satu bentuknya adalah tindakan Jepang membangun atau membentuk *Comfort Station* dimana difungsikan sebagai tempat “hiburan” bagi tentara Jepang di Korea Selatan. *Comfort Station* sendiri berisikan para remaja perempuan dimana berkisar pada umur belasan hingga dua puluhan tahun Korea Selatan diperkerjakan secara paksa oleh tentara Jepang menjadi penghibur atau dikenal dengan nama *Comfort Women* (Min, 2003). Para wanita dibawa dan diperlakukan tidak manusiawi dimana kerap mendapatkan penyiksaan, dipukuli hingga tusukan. Bahkan para perempuan tersebut dipaksa untuk “menghibur” 10 hingga 30-an tentara Jepang setiap harinya (Min, 2003). Setelah *Comfort Women* berakhir, tidak banyak yang bertahan hidup. Mayoritas korban mengidap penyakit kelamin dan sebagian besar lainnya melakukan bunuh diri (Fisher, 2015). Oleh karena itu hanya sedikit korban *Comfort Women* yang dapat bertahan hidup. Pada sisi lain para korban yang bertahan hidup, mayoritas menderita penyakit baik fisik atau mental.

Pada masa Perang Dunia II, *Comfort Women* di mana para wanita dipaksa menjadi wanita penghibur dan budak seks bagi tentara Jepang cukup masif. Diperkirakan sejumlah 70.000 hingga 200.000 wanita diperbudak pada masa itu (Britannica, n.d.). Dalam hal ini Korea menjadi korban utama mengingat Jepang sangat menguasai wilayah tersebut dan kemudahan untuk menjaring korban. Sehingga demikian Isu *Comfort Women* atau *Jugun Ianfu* (wanita penghibur) sangat membekas dalam ingatan masyarakat Korea selatan. Sejak tahun 1990 an, isu *Comfort Women* atau *Jugun Ianfu* atau yang kerap mendapat julukan wanita penghibur menjadi masalah krusial bagi hubungan Jepang-Korea dalam hal diplomatik.

Setelah kekalahannya dalam Perang Dunia II, Jepang mengalihkan orientasinya menjadi negara yang berfokus pada ekonomi dibawah kepemimpinan Yoshida. Untuk menunjang perkembangan perekonomiannya utamanya perindustrian, Jepang melakukan jalinan

hubungan dengan negara – negara lain, terkhusus di Asia Timur. Demikian Korea Selatan juga menjadi target jalinan hubungan, rangkaian upaya normalisasi hubungan dilakukan oleh Jepang terhadap Korea Selatan. Akhirnya dibuat sebuah perjanjian yang menjadi tonggak keterhubungan dua negara tersebut pada tahun 1965 dengan nama *Treaty on Basic Relationship* (Dyansa, 2018, pp. 56-58). Pada perjanjian itu berisi beberapa kesepakatan terkait kerjasama ekonomi dan penyelesaian terkait properti dan hak asasi korban sebesar 800 juta dollar.

Namun demikian normalisasi hubungan tersebut dipandang berbeda oleh masyarakat Korea dimana menimbulkan pertentangan dan beberapa gerakan, utamanya terkait isu *Comfort Women* yang dianggap belum selesai dan tidak diperhatikan. Permasalahan *Comfort Women* mulai digerakkan pada tahun 1987 yang kemudian disusul aksi – aksi berikutnya seperti demonstrasi di Seoul tahun 1989, kemudian tahun 1990 sebanyak 37 organisasi Korea mengeluarkan deklarasi berupa tuntutan dan kritik pada pemerintah Jepang untuk mengakui dan terlibat adanya *Comfort Women* (Ariani, 2021). Gerakan itu kemudian berkembang lebih besar dimana tahun 1991 seorang korban *Comfort Women* memberikan kesaksian dan menggugat pemerintah Jepang untuk bertanggung jawab. Dalam hal ini beliau sebutkan meminta Jepang untuk meminta maaf secara resmi dan tulus kepada semua korban, pemberian kompensasi serta pemasukan sejarah *Comfort Women* dalam buku sejarah di Jepang dan pembangunan monumen korban isu tersebut (Ariani, 2021). Jepang merespon tindakan itu bahwa permasalahan tersebut sudah terselesaikan dalam perjanjian tahun 1965. Respon Jepang tersebut membuat semakin gencar gerakan masyarakat dimana tekanan terhadap pemerintah Korea juga semakin membesar. Akibatnya pada tahun 1993 Presiden Korea Selatan Kim Young Nam menuntut Jepang untuk mengungkapkan kebenaran dan meminta maaf secara tulus.

Permintaan Presiden Korea Selatan tersebut, kemudian mendapat perhatian dari pemerintah Jepang bahwa isu tersebut masih menghambat hubungan baik kedua negara. Demikian pemerintah Jepang mengkonfirmasi keterlibatan pemerintah Jepang dalam *Comfort Women* setelah adanya investigasi internal. Serta meminta maaf secara Jepang kepada korban yang disampaikan Kono Yohei, Sekretaris Kepala Kabinet (Putri, 2018). Selain itu pada tahun 1994 pemerintah Jepang mendirikan AWF (*Asian Women's Fund*) untuk memberikan bantuan serta kompensasi terhadap korban. Meski demikian isu ini belum juga dapat terselesaikan

dimana masih ada pertentangan dari masyarakat Korea Selatan terhadap Jepang. Puncaknya terjadi pada tahun 2011 dimana masyarakat Korea Selatan mendirikan patung korban *Comfort Women* di depan kedutaan Jepang di Korea Selatan. Setelahnya isu *Comfort Women* kembali menuai perhatian besar dalam perpolitikan kedua negara. Pada tahun 2015 Jepang dan Korea Selatan membuat perjanjian bersama untuk penyelesaian isu tersebut. Akan tetapi gerakan – gerakan dan tuntutan terhadap Jepang terkait *Comfort Women* masih terus muncul. Sehingga Jepang terus melakukan upaya untuk menangani perihal itu. Fenomena diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan dalam menyelesaikan isu *Comfort Women*, menjadi dasar dari penelitian ini. Mengingat panjangnya proses dan sulitnya penerimaan untuk menyudahi isu tersebut. Utamanya respon dari Korea Selatan yang mengalami fluktuasi.

KERANGKA BERPIKIR

A. Teori Pengambil Keputusan

Adanya praktik *Comfort Women* sebagai fakta historis di Korea Selatan saat pendudukan Jepang, hingga saat ini masih meninggalkan kesan mendalam bagi warga Korea Selatan, utamanya mereka sebagai korban praktik tersebut. Hal ini kemudian mendorong hubungan yang kurang baik antara kedua negara tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan Jepang untuk meredakan konflik ini, diantaranya adalah *Perjanjian The Basic Treaty* tahun 1965, *Kono Statement*, Pembentukan *Asian Women's Fund*, dan *Perjanjian Japan-ROK Agreement on Comfort Women* tahun 2015.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan Jepang untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan Korea Selatan, maka kerangka teori yang akan dipakai sebagai acuan dalam makalah ini adalah teori *Decision Making* (pengambilan keputusan) yang pertama kali digunakan oleh Herbert A. Simon dalam bukunya yang berjudul "*Administrative behavior: A Study of Decision Making Processes in Administrative Organization*" yang terbit pada tahun 1947.

Teori pengambilan keputusan merupakan teori yang sangat penting bagi suatu negara guna menentukan arah suatu kebijakan serta sebagai gambaran awal. Terdapat faktor internal dan eksternal yang harus dipertimbangkan negara dalam menggunakan teori ini. Kebijakan luar negeri akan berpengaruh dari interaksi antara faktor internal dan eksternal. Hubungan antara masyarakat dan negara ditentukan oleh faktor internal, sedangkan hubungan negara

dengan negara lain maupun sistem global dipengaruhi oleh faktor eksternal (Snyder, 1962). Hal yang tidak boleh diabaikan adalah pandangan publik yang juga dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan. Di mana pandangan publik merupakan bentuk seruan dari masyarakat.

Lalu teori lain yang dipakai adalah teori konsep penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh J.G. Starke. Sengketa internasional atau *international disputes* merupakan permasalahan yang mencakup sistem global dan menyeluruh dan tidak hanya berputar pada kasus negara. Berdasarkan J.G. Starke, penyelesaian sengketa digolongkan menjadi dua metode, yakni:

1. Penyelesaian secara damai, penyelesaian ini dapat terjadi jika kedua pihak yang berkonflik menemukan suatu solusi dan sepakat terhadap solusi yang ada.
2. Penyelesaian secara paksa, penyelesaian kasus ini lebih condong menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.

Kedua metode di atas kemudian dikelompokkan kedalam beberapa bagian terutama dalam penyelesaian secara damai, yaitu:

- a. Arbitrase (*Arbitration*). Penyelesaian masalah ini menggunakan pihak ketiga sebagai pendamai yang merupakan salah satu warga dari negara yang berkonflik. Arbitrator yang dipilih merupakan orang yang disepakati dan dipilih secara acak oleh negara bersangkutan.
- b. Penyelesaian yudisial (*judicial settlement*). Penyelesaian masalah ini menggunakan jalur hukum, yakni pengadilan serta mengikuti aturan hukum yang berlaku.
- c. Negosiasi, jasa-jasa baik (*good offices*), mediasi, konsiliasi, dan penyelidikan (*inquiry*). Jenis penyelesaian menggunakan metode ini cenderung lebih santai dan lebih mudah dilakukan dan sifatnya non formal
- d. Penyelesaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penyelesaian ini akan diserahkan ke Dewan Keamanan maupun Majelis Umum guna menetapkan solusi. Solusi yang diberikan akan meminimalisir renggangnya hubungan diantara kedua negara serta mencegah terganggunya hubungan diplomatic negara bersengketa.

Sayangnya, tidak semua negara mau menyelesaikan masalah secara damai. Oleh karena itu, terdapat metode paksaan guna menyelesaikan sengketa yang ada. Metode yang dapat dilakukan, diantaranya (Dwi, 2021):

- a. Melalui Retorsi (*retortion*)

- b. Melakukan tindakan pembalasan
- c. Melancarkan perang bersenjata dan non-senjata
- d. Melakukan intervensi
- e. memblokade wilayah secara damai (*pacific blockade*)

Dalam isu *Comfort Woman* yang terjadi antara Jepang dengan Korea Selatan ini, Jepang menggunakan cara penyelesaian secara damai melalui negosiasi berupa berbagai perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian *Japan-ROK Agreement on Comfort Women 2015* menjadi perjanjian antara Yun Byung-Se selaku Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Fumio Kishida yang merupakan Menteri Luar Negeri Jepang. Perjanjian ini diumumkan pada 28 Desember 2015. Sayangnya, perjanjian yang sudah final ini menuai banyak kritik dan ditolak oleh mereka yang merupakan aktivis serta pengamat HAM terkait kasus budak seks di Jepang.

B. Konsep Diplomasi

Diplomasi merupakan sebuah upaya yang bisa digunakan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi akan membantu suatu negara dalam membangun maupun membangun citranya menjadi lebih baik di mata negara lain. Upaya ini dilakukan antar negara tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Hal ini mencakup hubungan luar negeri yang akan diterapkan serta kebijakan – kebijakan maupun perjanjian yang akan dilakukan. Diplomasi dianggap sebagai upaya paling efisien untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas negara. Kegiatan diplomasi dapat juga dilakukan melalui negosiasi dan pertemuan antar negara yang bersangkutan. Diplomasi menjadi solusi untuk mendamaikan pihak yang berkonflik. Melalui diplomasi, pihak berkonflik akan mampu menyelesaikan masalah secara lebih cepat dan juga damai (Nurika, 2017).

METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian ilmiah sangat memerlukan sebuah metode penelitian. Metode penelitian akan membantu penulis dalam mengkaji penelitian ilmiah sehingga didapat hasil dan tujuan. Data yang tepat serta pemahaman yang komprehensif terkait objek akan lebih mudah menggunakan metode penelitian. Metode yang digunakan haruslah sistematis dan tepat agar upaya peneliti dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian dapat berjalan

dengan baik. Tujuan utamanya adalah mengungkap suatu masalah. Oleh karena itu, langkah yang diambil harus tepat dan sesuai dengan rumusan masalah.

Objek yang akan diteliti guna melengkapi data dapat berupa peristiwa, kondisi, pemikiran, maupun gerakan masyarakat saat itu menggunakan metode penelitian. Tujuan dari penelitian model deskriptif adalah untuk membuat gambaran, deskripsi, atau lukisan secara faktual, sistematis, dan akurat yang didalamnya terdapat sifat-sifat, fakta-fakta, dan hubungan yang terjadi antara fenomena yang sedang diteliti. (Sugiyono, 2013) Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memfokuskan pada pendekatan studi kasus.

Menurut John W. Creswell, studi kasus adalah eksplorasi "suatu sistem yang terikat" atau "suatu kasus/banyak kasus" yang tunduk pada pengumpulan data yang mendalam dari waktu ke waktu dan melibatkan berbagai informasi "kaya" dalam suatu sumber kasus. Sistem yang mengikat ini terikat oleh waktu dan tempat, sedangkan kasus dapat dipelajari dari program, peristiwa, kegiatan, atau individu. Studi kasus adalah studi di mana seorang peneliti mengeksplorasi suatu fenomena (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, peristiwa, proses, lembaga, atau kelompok sosial) dan mengumpulkan informasi rinci dan mendalam dalam rentang tertentu dengan menggunakan berbagai pengumpulan data prosedur (Wahyuningsih, 2013).

Dalam penelitian ini, penulis berupaya menjelaskan isu yang sedang diteliti dengan analisa yang didukung oleh data serta fakta yang relevan. Pengumpulan data penelitian berasal dari sumber sekunder. Data-data yang akan diambil adalah data mengenai upaya Pemerintah Jepang dalam menangani isu *Comfort Women*. Data tersebut berupa kumpulan berita serta referensi dari buku dan jurnal.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Isu *Comfort Women* dan dampaknya terhadap masyarakat Jepang

Isu wanita penghibur atau *comfort woman (jugun ianfu)* merupakan masalah diplomatik yang besar bagi Pemerintah Jepang sejak tahun 1990an, hal ini sangat mempengaruhi hubungannya dengan Korea Selatan. Sejak kemenangan Jepang dalam perang dengan Cina serta Rusia mengawali negara tirai bambu ini untuk meluaskan di Asia. Negara Jepang menduduki berbagai wilayah dari mulai Filipina, Indonesia, Myanmar, Vietnam hingga Korea.

Besarnya wilayah jajahan tersebut menjadikan Jepang harus memenuhi berbagai kebutuhan tentara untuk menjaga kekuatannya terus mencekram. Salah satu bentuknya adalah pembangunan *comfort station* dimana difungsikan sebagai tempat pemenuhan kebutuhan seksual tentara Jepang. Korea menjadi tempat paling banyak menyumbang pemenuhan wanita untuk diperkejakan secara paksa dalam tempat tersebut. Tercatat sekitar 80% dari seluruh *Comfort Women* atau wanita yang "menghibur" di *comfort station* berasal dari negara Korea (Adityani, 2018). Demikian isu *Comfort Women* sangat melekat dalam masyarakat Korea selatan. Selain dari banyaknya wanita yang dipaksa untuk dijadikan budak seks melayani tentara Jepang. Para *Comfort Women* tersebut juga tidak diperlakukan manusiawi. Selain harus melayani barisan tentara Jepang, mereka juga mengalami penindasan, kekerasan fisik dan mental, kelaparan hingga penyakit menular seksual (Comfort Women Justice Coalition, n.d.). Akibatnya banyak diantara *Comfort Women* yang tidak selamat hingga perang dunia 2 berakhir atau kekalahan Jepang dimana kematian disebabkan oleh penyakit, penindasan maupun bunuh diri. Tercatat berkisar 10 hingga 25 % yang berhasil selamat dari sekitar 400.000 wanita dan anak – anak yang dipekerjakan (Comfort Women Justice Coalition, n.d.). Catatan sejarah tersebut membuat upaya pembangunan antara Jepang dan Korea Selatan mengalami hambatan.

Setelah kekalahan Jepang dan kemerdekaan Korea Selatan, isu terkait dengan *Comfort Women* tidak menjadi perhatian. Seakan – akan menghilang dan hanya menjadi peristiwa sejarah yang tidak begitu diperhatikan. Namun demikian pada tahun 1990, setelah Korea Selatan mengalami demokratisasi. Yun Chung-Ok seorang peneliti menuliskan artikel terkait *Comfort Women* melalui koran Hankyoreh (AWF, n.d.). Setelahnya isu terkait *Comfort Women* memperoleh perhatian pada masyarakat kembali. Utamanya pada masa tersebut Jepang berupaya menjalin hubungan dengan Korea Selatan. Setelahnya pada 17 Oktober 1990, tergabung 37 organisasi wanita Korea Selatan dimana melakukan deklarasi serta penuntutan terhadap pemerintah Jepang. Terdapat 6 tuntutan yang dinyatakan yakni pengakuan bahwa pekerja *Comfort Women* diambil secara paksa; permintaan maaf; melakukan investigasi mendalam terkait isu tersebut; membangun monumen mengenang para korban; memberikan kompensasi; memberikan pendidikan terkait sejarah akan isu *Comfort Women*. (AWF, n.d.). Tuntutan yang dilayangkan dari gerakan tersebut, kemudian sampai pada Diet Jepang.

Pada tahun 1991 guncangan terkait isu *Comfort Women* semakin membesar. Setelah adanya pernyataan secara terbuka korban *Comfort Women*, Kim Hak-Sun. Beliau menyampaikan penderitaan serta meminta Jepang untuk bertanggung jawab dan memberikan kompensasi. Akibatnya masyarakat Jepang mulai menyadari adanya isu tersebut. Kemudian pada tahun 1992 Yoshiaki Yoshimi, seorang profesor di Universitas Chuo menemukan bukti terkait keterlibatan militer Jepang terhadap *Comfort Women*. Setelahnya pemerintah Jepang, turut melakukan penyelidikan kasus tersebut. Berdasarkan hasil dari investigasi yang dilakukan, ditemukan berbagai dokumen yang menyatakan keterlibatan militer Jepang terhadap pembentukan *Comfort Women*. Serta para korban terkait *Comfort Women* sejumlah 16 orang berhasil ditemukan dan diwawancarai (AWF, n.d.). Demikian mendorong pemerintah Jepang semakin fokus untuk menangani isu tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan melakukan permintaan maaf pemerintah Jepang oleh kepala sekretaris Kabinet, Yohei Kono pada tahun 1993. Sehubungan dengan hal itu pada tahun berikutnya, 1994 dibangun *Asian's Women Fund* sebagai saluran untuk memberikan kompensasi terhadap korban.

Meski begitu permasalahan terkait dengan *Comfort Women* belum selesai. Dalam hal ini masih terus terjadi pergerakan di masyarakat Korea Selatan, seperti demonstrasi setiap hari rabu di depan kedutaan Jepang di Korea Selatan. Puncaknya adalah pada tahun 2011 terjadi pembangunan patung memorial *Comfort Women* di depan kedutaan Jepang di Korea Selatan (McCoy, 2022). Hal tersebut menjadikan desakan mendalam bagi pemerintah Jepang untuk merespon permasalahan itu. Demikian di buatlah sebuah perjanjian bersama pada tahun 2015 yang berisi terkait kesepakatan penyelesaian isu *Comfort Women*. Serta perjanjian tersebut disebutkan sebagai final dan *irrevisiable* (Hosaka, 2021). Namun demikian masih terjadi pertentangan diantara kedua belah pihak dimana terdapat beberapa perjanjian yang tidak dipenuhi secara maksimal. Sehingga terus muncul tindakan diplomasi antara pemerintah Jepang dan Korea. Serta gerakan – gerakan yang menuntut terhadap pemerintah Jepang, baik oleh para masyarakat Korea Selatan maupun masyarakat luar negeri seperti Amerika hingga Jepang.

Upaya penyelesaian yang tidak kunjung menemui titik akhir membuat hubungan kedua negara cenderung kurang harmonis. Bahkan perasaan trauma dan sentiment negatif tertanam mendalam pada masyarakat Korea Selatan terhadap Jepang. Misalnya saja dalam

sebuah survei yang dilakukan tahun 2013 sebanyak 77 % responden menyatakan ketidaksukaannya dengan negara Jepang. Serta dalam tahun yang sama survei pada masyarakat Jepang, diketahui isu terkait *Comfort Women* adalah hal yang pertama kali terpikirkan setelah mendengar kata Jepang (Adityani, 2018). Demikian menunjukan betapa besarnya perhatian masyarakat Korea selatan terkait isu *Comfort Women* yang tercatat dalam sejarah kelam.

B. Upaya pemerintah Jepang dalam menanggapi isu Comfort Women dan Aktor yang Terlibat dalam Perumusan Resolusi Isu *Comfort Women*

Seperti diketahui setelah kehahalan Jepang dalam perang dunia 2, negara ini mulai beralih dari konsep yang demarkasi dan progresif militer. Berubah haluan menjadi negara pasifis dan berupaya membangun hubungan baik dengan negara – negara sekitar tak terkecuali Korea Selatan. Namun hubungan kedua negara menghadapi tantangan berupa isu *Comfort Women*. Sejak tahun 1992 setiap hari rabu terjadi gerakan – gerakan demonstrasi yang menuntut isu tersebut. Berbagai upaya akhirnya telah dilakukan Jepang untuk meredakan konflik ini, yaitu Perjanjian *The Basic Treaty* tahun 1965, *Kono Statement*, Pembentukan *Asian Women's Fund*, dan Perjanjian *Japan-ROK Agreement on Comfort Women* tahun 2015.

Perjanjian *The Basic Treaty* tahun 1965, dilakukan oleh Jepang dan Korea untuk memperbaiki hubungan bilateral, sebagai tanda awal mula dimulainya kembali hubungan antar kedua negara tersebut. Perjanjian tersebut berisikan kerjasama ekonomi yang akan dibangun oleh kedua negara, hubungan diplomatik yang akan dibangun hingga penyelesaian permasalahan kedua negara terkait properti dan Hak Asasi korban. Pada pasal 1 ayat 2 tertulis bahwasannya permasalahan kedua negara terkait properti, hak asasi dan kepentingan kedua pihak atas masing-masing negaranya dinyatakan telah terselesaikan (Dyansa, 2018). Berdasarkan pasal tersebut, Jepang telah menyatakan bahwa permasalahan antara kedua negara termasuk *Comfort Women* telah terselesaikan. Sayangnya, masyarakat Korea Selatan melihat bahwa permasalahan ini belum terselesaikan secara jelas karena Pemerintahan Jepang masih belum memberikan bantuan secara finansial maupun meminta maaf secara resmi pada korban. Tentu saja, hal ini menimbulkan kontra bagi masyarakat Korea Selatan. Sebelumnya sesuai dengan *Treaty on Basic Relationship*, Jepang telah memberikan kompensasi secara finansial

kepada Korea Selatan sebesar \$800 juta. Seluruh biaya tersebut tidak jatuh langsung kepada korban kerja paksa maupun korban *Comfort Women* melainkan digunakan untuk pembangunan negara dan perbaikan infrastruktur. Tentu saja, masyarakat mendorong pemerintahan Korea Selatan untuk melakukan negosiasi ulang agar korban *Comfort Women* dapat menerima kompensasi.

Upaya lain yang dilakukan untuk meredakan isu yakni adanya pernyataan dari Sekretaris Kabinet Jepang, yang disebut dengan Kono Statement. Kono Statement merupakan pernyataan bersalah dan permintaan maaf yang dilakukan pemerintah Jepang, yang diwakili oleh Kepala Sekretaris Kabinet bernama Yohei Kono. Setelah ditemukannya bukti sistem *Comfort Women* pada tahun 1992, dengan ditemukannya berkas telegram yang berisi permintaan dari militer Jepang untuk mengirim *Comfort Women* Taiwan ke Borneo. Pada tanggal 4 Agustus 1993 Yohei kono memberikan pernyataan, Jepang mengakui bahwa pihaknya terutama militer Jepang melakukan adanya aktivitas perekrutan *Comfort Women* secara paksa. Disusul dengan permintaan maaf Perdana Menteri Murayama Tomiichi pada Agustus 1994, yang menyatakan penyesalan dan permintaan maaf mendalam kepada seluruh *Comfort Women*. Perdana Menteri Murayama juga menambahkan, bahwa pemerintah dan masyarakat Jepang akan berpartisipasi dalam sentimen *Comfort Women*. Pengakuan dari Kono Statement dan Perdana Menteri Murayama Tomiici, membantu mengungkap kasus yang selama hampir lima puluh tahun tidak diakui Jepang. Upaya dari kedua tokoh Jepang tersebut menghasilkan kebijakan untuk dilakukannya 'investigasi kembali' dan dibentuknya organisasi Asian Women's Fund yang dapat membantu memberikan kompensasi bagi para korban *Comfort Women*.

Asian Women's Fund (AWF) dibentuk atas perintah Perdana Menteri Murayama Tomiici pada Juli 1995. Menurut AWF Pemerintah Jepang memberikan dana kompensasi dan reparasi untuk ganti rugi psikologis para korban dengan dana sebesar 480 milyar yen (Adeana, 2019). Setelah proyek ini dilaksanakan, para pemerintah berniat memberikan permintaan maaf secara tulus kepada para *Comfort Women* dan Jepang juga berniat menyediakan dan menyusun data-data yang berkaitan dengan isu *Comfort Women*, yang kemudian akan dijadikan sebagai pelajaran sejarah. Upaya platform *Asian Women's Fund*, dianggap gagal karena ditolak oleh mayoritas mantan *jugun ianfu*, kelompok aktivis pembela *jugun ianfu* dan kelompok-kelompok masyarakat Jepang yang berpandangan sama. Penolakan bantuan ini dilakukan

karena bertolak belakang dengan tuntutan mereka. Terdapat tiga alasan penolakan terkait proyek AWF. Pertama, kompensasi dana yang diberikan kepada mantan *jugun ianfu* tidak secara langsung dari dana pemerintah namun berasal dari dana yang diperoleh dari sumbangan masyarakat. Kedua, para korban tidak akan menerima kompensasi tanpa adanya permintaan maaf secara resmi dari negara Jepang. Hal ini dikhawatirkan bahwa pemberian uang kompensasi hanya sebagai strategi bagi Jepang untuk menghindari pernyataan permintaan maaf secara resmi. Ketiga, pengumpulan dana kompensasi yang dilakukan secara terbuka pada masyarakat luas, mengindikasikan bahwa Jepang berupaya untuk menghindar dan mengurangi beban untuk melakukan upaya pemberian kompensasi pada para Korban *Comfort Women*. Pada masa Moon Jae In, yayasan Asian Women Fund yang dibentuk oleh Jepang dibubarkan. AWF beroperasi dari 1995 hingga 2007.

Pada 14 Desember 2011, sejumlah protes besar dilayangkan kepada pihak Jepang oleh sejumlah NGO dan juga masyarakat. Aksi tersebut juga bertepatan dengan peringatan 1000 hari *Wednesday Demonstration* di mana demo itu menuntut hak para wanita yang menjadi mantan *jugun ianfu*. Kebanyakan dari mereka berasal dari Korea Selatan. Hal ini dilakukan secara terus menerus di depan Kantor Kedutaan Jepang di Seoul tepatnya di setiap hari Rabu.

Tidak hanya itu, sebuah *Pyeonghwa-bi* atau patung *jugun ianfu* didirikan dan diletakkan di depan Kantor Kedutaan Besar Jepang di Seoul. Presiden Korea Selatan, Park Geun-Hye juga mengancam tidak akan melakukan pertemuan formal untuk hubungan bilateral kepada Jepang yakni PM Shinzo Abe apabila kasus *jugun ianfu* di Korea Selatan belum mendapat repon berupa permintaan maaf dan kompensasi.

Sikap tegas Presiden Korea Selatan ini menjadikan pihak Jepang berusaha menyelesaikan kasus ini. Jepang memerlukan Korea Selatan dan hubungan yang baik guna menghadapi ancaman Korea Utara dalam hal nuklir. Oleh karena itu, muncullah perjanjian *Japan-ROK Agreement on Comfort Women 2015* pada 28 Desember 2015. Perjanjian ini diwakili oleh Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yun Byung-Se dan Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida. Kedua Menteri Luar Negeri menyampaikan pernyataannya masing-masing (Ratri & Kurniawati, 2019). Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida menyampaikan beberapa poin atas perjanjian tersebut, yaitu:

- 1) Pihak Jepang secara tulus meminta maaf kepada para mantan *jugun ianfu* dan akan bertanggung jawab atas kasus yang pernah terjadi.

- 2) Jepang akan memberikan dana sebesar 1 miliar yen guna mendirikan yayasan rehabilitasi para mantan jugun ianfu di Korea Selatan. Hal ini merupakan kerjasama antara pihak Korea Selatan dan Jepang.
- 3) Pihak Jepang secara resmi menganggap permasalahan ini selesai serta menutup kasus ini. Kasus ini tidak boleh diangkat maupun diungkit ke forum internasional maupun PBB.

Kemudian Perdana Menteri Korea Selatan Yun Byung-se juga mengumumkan pernyataannya dalam tiga poin penting, yaitu:

- 1) Pihak Korea Selatan menegaskan bahwa kasus ini sudah final dan langkah-langkah yang diambil merupakan keputusan bersama.
- 2) Keberadaan patung jugun ianfu yang didirikan di depan Kantor Kedutaan Jepang di Seoul akan ditindaklanjuti pemerintah Korea Selatan.
- 3) Keduanya, baik Jepang maupun Korea Selatan berjanji untuk tidak membahasa masalah ini lagi serta menghentikan kritik di forum manapun termasuk forum internasional dan harus diimplementasikan.

Kesepakatan ini tidak serta merta selesai, keduanya melakukan hubungan melalui kontak telepon antara PM Shinzo Abe dan Presiden Park Geun-Hye. Kedua negara sepakat menyelesaikan masalah jugun ianfu guna memperbaiki hubungan di masa depan. Namun, perjanjian ini menuai kritik dan ditolak oleh mereka yang merupakan korban dan aktivis HAM ketika perjanjian tersebut belum berjalan satu tahun.

Berbagai upaya telah dilakukan Jepang untuk menyelesaikan masalah jugun ianfu dan merespons tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh mantan jugun ianfu dan masyarakat internasional. Namun berbagai upaya tersebut masih belum, sepenuhnya diterima dan belum mampu memenuhi tuntutan para korban, khususnya dalam *Agreement on Comfort Women* 2015 yang bersifat final dan tidak bisa diubah. Banyak terdapat kritik dan penolakan terhadap perjanjian tersebut meski ada pula yang menyetujui adanya perjanjian itu.

Pemerintah Jepang telah berupaya memberikan penjelasan yang jelas mengenai upaya tulus dan posisi resminya di forum internasional. Sebagai respon resminya atas laporan dan tekanan dari berbagai pihak, sesuai dengan pernyataannya pada *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), Jepang pun menyatakan bahwa (Japan Ministry of Foreign Affairs, 2021b): (1) Untuk masalah wanita penghibur, Pemerintah telah menanganinya dengan sungguh-sungguh; (2) Pemerintah Jepang telah

dengan tulus menangani masalah reparasi, properti, dan klaim yang berkaitan dengan Perang Dunia Kedua di bawah *San Francisco Peace Treaty*, (3) Jepang telah secara aktif mengambil langkah-langkah tambahan untuk mengembalikan kehormatan mantan wanita menghibur dan memberikan solusi bagi mereka; (4) Jepang akan memimpin dunia dalam menjadikan abad ke-21 sebagai era di mana hak asasi perempuan tidak dilanggar. Jepang berkontribusi dan mendukung berbagai proyek kemanusiaan.

C. Respon Korea Selatan Terhadap Upaya Jepang

Pelaksanaan pemulihan hubungan baik antara Jepang dan Korea Selatan tidaklah mudah dicapai dimana terdapat dinamika - dinamika di dalamnya. Dalam memperbaiki dan menjalin hubungan baiknya dengan Korea Selatan, Jepang pada tahun 1965 melakukan tindakan dengan menjalin kerjasama yang tertuang pada *Treaty on Basic Relations*. Pada kerjasama tersebut memuat kesepakatan yang mana Jepang akan memberikan kompensasi terhadap negara Korea Selatan melalui kerjasama. Hal ini tertuang dalam poin – poin perjanjian yang memuat terkait hubungan diplomatik kedua negara, pembatalan perjanjian aneksasi, pengakuan Korea Selatan sebagai pemerintah yang sah dan sebagainya (Prashernanda, 2019). Namun demikian selain pada poin – poin yang dalam perjanjian. Terdapat juga klausa pada perjanjian tersebut yang memuat adanya pinjaman sebesar \$845 juta untuk pembangunan dan dana hibah bantuan sebesar \$300 juta (V, 1996). Melalui perjanjian tersebut memulai langkah awal pemulihan hubungan antara Jepang dan Korea Selatan. Adanya perjanjian 1965 tersebut hanya menjadi langkah awal dari pemulihan hubungan kedua negara, tidak memberikan dampak secara nyata terkait permasalahan isu *Comfort Women* mengingat dalam klausa itu tidak terdapat pernyataan mengenai *Comfort Women* yang menjadi pembahasan. Korea Selatan sendiri merespon adanya kerjasama melalui perjanjian tahun 1965 dengan terbuka dimana melihat peluang terkait kerjasama ekonomi antara Jepang dan Korea Selatan. Namun tidak mencakup penyelesaian terkait isu *Comfort Women* itu sendiri.

Setelah adanya upaya pemulihan hubungan Jepang dan Korea Selatan melalui perjanjian tersebut. Jepang terus berusaha memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan. Utamanya setelah adanya demonstrasi tahun 1992 yang menuntut pertanggungjawaban Jepang terkait isu *Comfort Women*. Hubungan kedua negara terus mengalami dinamika.

Akibatnya untuk memperbaiki hal itu, Jepang berupaya dengan melakukan permintaan maaf dan mengatakan bahwa *comfort station* yang menjadi tempat bagi para *Comfort Women* disebabkan oleh pihak luar (swasta) bukan oleh pemerintah Jepang ataupun militer. Permintaan maaf ini kemudian ditolak oleh Korea Selatan (Lalitya, 2020). Demikian Pemerintah Jepang berupaya kembali dimana pada tahun 1993 Ketua Sekretaris Yohei Kono menyatakan permintaan maaf kembali dan mengakui bahwa militer Jepang terlibat dalam praktek *Comfort Women*. Permintaan maaf ini kemudian dikenal dengan sebutan *Kono Statement*. Adanya tindakan itu direspon baik oleh Korea Selatan atas pengakuan keterlibatan militer Jepang dan tindakan pemaksaan dalam kelahiran *Comfort Women*. Pada sisi lain respon yang diberikan oleh Korea Selatan adalah permintaan maaf tersebut belum memenuhi untuk menyelesaikan isu *Comfort Women* dimana meminta Jepang untuk memberikan kompensasi serta pertanggung jawaban (Lalitya, 2020). Upaya untuk menangani isu *Comfort Women* di Korea Selatan terus menjadi perhatian dimana kemudian pada tahun 1995 dibawah komando perdana menteri Murayama Tomiichi mendirikan Asian Women's Fund (AWF) sebagai lembaga penggalangan dana secara sukarela dari masyarakat Jepang untuk memberikan bantuan – bantuan terhadap para korban *Comfort Women*. Tujuannya adalah untuk memberikan sikap prihatin masyarakat Jepang terhadap isu tersebut serta bentuk niatan Jepang untuk memberikan "kompensasi". Namun demikian adanya AWF ini ditolak oleh korban *Comfort Women*, dimana dirasa tidak memenuhi tuntutan mereka. Hal ini karena dana kompensasi yang diberikan adalah bentuk himpunan masyarakat Jepang secara sukarela, bukan dari pemerintah Jepang langsung. Serta pada sisi lain tidak adanya permintaan maaf secara resmi dari pemerintah Jepang itu sendiri (Henson, 2017). Adanya hambatan penjalinan hubungan yang lebih baik dikarenakan isu *Comfort Women* tersebut, membuat pemerintah Jepang menaruh perhatian yang lebih mendalam pada fenomena ini.

Pada tahun 2015 di bawah pemerintahan perdana menteri Shinzou Abe, Jepang menjalin upaya penyelesaian isu *Comfort Women* melalui *Japan-ROK Agreement on Comfort Women*. Dalam kesepakatan tersebut membahas mengenai klausa – klausa untuk berkomitmen bersama menyelesaikan isu *Comfort Women* yang menjadi perhatian. Hasilnya adalah Perdana Menteri Shinzo Abe dan Presiden Park Geun-Hye menyepakati terkait perjanjian tahun 2015 tersebut. Meski pemerintah Korea Selatan menerima dan menyepakati kesepakatan tahun 2015 yang disebut *final dan irreversible*. Pada sisi lain para korban serta

aktivis *Comfort Women* mengkritik terkait hal itu. Penolakan ini dilatarbelakangi beberapa hal yakni adanya penandatanganan perjanjian tersebut dinilai tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan korban dan tidak ada pernyataan persetujuan dari korban atas perjanjian itu. Kemudian permintaan maaf secara langsung yang dituntut oleh para korban tidak terpenuhi. Pengungkapan fakta sejarah *Comfort Women* dalam pendidikan Jepang tidak dimuat dalam perjanjian (Ratri and Kurniawati. Ibid.) Demikian adanya perjanjian tahun 2015 tersebut belum dapat menyelesaikan isu *Comfort Women* dan Korea Selatan belum secara penuh menerima kesepakatan itu mengingat masih adanya penolakan dari para korban *Comfort Women*. Pendapat mengenai penolakan perjanjian tahun 2015 ini kemudian berkembang lagi dimana Presiden Korea Selatan selanjutnya yakni Moon Jae In beranggapan bahwa kesepakatan tersebut tidak dapat memenuhi tuntutan korban *Comfort Women* dan merupakan sebuah kesalahan dalam menandatangani perjanjian itu. Demikian pada era Moon Jae In dilakukan investigasi kembali terkait kesepakatan tersebut untuk menilai substansi dari perjanjian yang ada. Kemudian ditemukan bahwasannya perjanjian yang ada tidak bersifat adil dan mencerminkan pertanggungjawaban dimana terdapat beban kewajiban yang lebih besar terhadap Korea Selatan. Oleh karena itu isu *Comfort Women* hingga sekarang ini belum bisa untuk diselesaikan dan menemui titik temu.

Upaya diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan mengenai isu *Comfort Women* menghadapi fluktuasi dan dinamika serta banyak hambatan. Namun demikian Jepang terus berupaya untuk melakukan diplomasi terhadap Korea Selatan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori pengambilan keputusan. Richard Snyder menyebutkan dalam tulisannya mengenai *decision making* atau pengambilan keputusan, didasari oleh dua faktor yakni internal dan eksternal. Pada faktor internal, dijelaskan menekankan terkait hubungan masyarakat dengan negara dan faktor eksternal lebih berfokus pada struktur internasional seperti hubungan dengan negara lain serta kondisi dunia (Rhasintya, 2020). Dalam isu *Comfort Woman* yang terjadi antara Jepang dengan Korea Selatan ini, Jepang menggunakan cara penyelesaian secara damai melalui negosiasi berupa berbagai perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian *Japan-ROK Agreement on Comfort Women 2015* menjadi perjanjian antara Yun Byung-Se selaku Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Fumio Kishida yang merupakan Menteri Luar Negeri Jepang. Perjanjian ini diumumkan pada 28 Desember 2015. Sayangnya, perjanjian yang sudah final ini menuai banyak kritik dan ditolak oleh mereka yang merupakan

aktivis serta pengamat HAM terkait kasus budak seks di Jepang. Faktor yang mendasari Jepang melakukan hal demikian dikarenakan beberapa hal. Pada segi faktor internal, awal mula yang mendorong adanya hal tersebut adalah investigasi yang dilakukan oleh professor Universitas Chuo, Yohsiaki Yoshimi pada tahun 1992 dimana menemukan dari pada bukti keterlibatan militer Jepang di isu *Comfort Women*. Kemudian mendorong daripada pemerintah melakukan investigasi secara lebih mendalam dan ditemukan berbagai bukti keterlibatan pemerintahan Jepang. Pada sisi lain masyarakat Jepang sendiri yang mengetahui isu *Comfort Women* menunjukkan empati dimana turut mendukung penyelesaian masalah. Seperti misalnya turut serta menyumbang pada *Asian's Women Fund* dimana merupakan lembaga untuk memberikan kompensasi terhadap korban *Comfort Women* (Lorentya, 2017). Selain itu di masa tersebut Jepang sedang dalam upaya membangun perekonomian dengan memperbaiki citra di dunia dan menjalin kerjasama terhadap negara – negara lain.

Pada segi eksternal terdapat berbagai hal yang mendorong tindakan Jepang. Naiknya isu *Comfort Women* disebabkan adanya publikasi seorang peneliti Korea Selatan yang mana menjelaskan terkait dengan *Comfort Women* di surat kabar. Setelahnya terjadi demonstrasi dan pengakuan dari korban *Comfort women* di Korea Selatan yang kemudian menuntut pertanggungjawaban kepada pemerintah Jepang. Kemudian tindakan tersebut berkembang menjadi isu politik dan menarik perhatian dunia terkait fenomena tersebut. Akibatnya Jepang terdorong untuk memberikan banyak perhatian dan berupaya untuk menyelesaikan isu *Comfort Women*. Berdasarkan teori Snyder terkait *decision making*, pada isu *Comfort Women* ini sangat terlihat dinamika antara faktor internal dan eksternal yang melatar belakangi keputusan Jepang untuk berdiplomasi menyelesaikan isu *Comfort Women*.

Upaya diplomasi yang dilakukan oleh Jepang terhadap Korea Selatan terkait dengan isu *Comfort Women*. Masih belum berhasil, bahkan dapat dikatakan gagal atau cenderung kearah negatif. Mengingat berbagai upaya yang dilakukan oleh Jepang sendiri belum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Korea Selatan maupun pemerintah Korea Selatan. Hal ini terlihat dimana berbagai upaya seperti *The Basic Treaty* tahun 1965, *Kono Statement*, Pembentukan *Asian Women's Fund*, dan Perjanjian *Japan-ROK Agreement on Comfort Women* tahun 2015 belum dapat menyelesaikan isu. Hal ini memberikan dampak pada hubungan kedua negara yakni perang dagang antara Korea Selatan dan Jepang tahun 2019, Penarikan Korea Selatan dari GSOMIA dan Boikot produk Jepang oleh masyarakat Korea

Selatan (MUFIDAH, 2021). Demikian upaya diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan masih jauh dari kata berhasil dan perlu adanya tindakan lebih dari Jepang untuk menyelesaikan isu tersebut.

KESIMPULAN

Kasus penculikan wanita asal Korea Selatan yang dilakukan oleh oknum Jepang merupakan kasus yang berlangsung cukup lama sejak Perang Dunia I hingga akhir Perang Dunia II. Tindakan tersebut dianggap lumrah oleh pemerintah Jepang saat itu guna memperbaiki semangat biologis tentara Jepang. Sayangnya, kasus ini melibatkan lebih dari 200.000 wanita dan dijadikan sebagai wanita panggilan atau Jugun Ianfu. Mereka yang berhasil melarikan diri menderita luka fisik dan juga psikis. Mereka juga ketakutan untuk menyuarkan apa yang terjadi pada diri mereka. Berakhirnya Perang Dunia II menjadi jalan bagi para perempuan menyuarkan hak mereka terutama di negara Korea Selatan. Isu wanita dan budaya mulai mendapat perhatian khusus. Korban kejahatan Jepang pun satu persatu mulai menyuarkan hak mereka kepada pemerintah Korea Selatan. Guna menjalin hubungan yang baik dengan Korea Selatan, pihak Jepang berusaha mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di masa lalu. Hal ini direalisasikan melalui permintaan maaf langsung dari Tomiichi Murayama selaku Perdana menteri Jepang. Permintaan maaf dari perdana menteri Jepang ini tidak sepenuhnya di terima. Pemerintah Korea Selatan menuntut pihak Jepang untuk meminta maaf kepada seluruh korban dan memberikan kompensasi finansial sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hak yang sudah dirampas.

Oleh karena itu, isu *Comfort Women* menjadi masalah diplomatik antara Jepang dan Korea Selatan, kedua negara terus berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalur diplomatik sesuai dengan konsep penyelesaian sengketa secara lunak. Jepang yang awalnya mengelak atas keberadaan isu ini, kini telah mengakui dan berjanji untuk menemukan resolusi agar tujuan nasional masing-masing pihak dapat tercapai. Jepang pun selalu menanggapi respon dari pihak eksternal terutama Korea Selatan untuk membuat kebijakan resolusi konflik. Hal ini tercermin dalam berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah *Comfort Women*. Jepang menandatangani Irreversible Agreement yang disebut Agreement on *Comfort Women* sebagai penyelesaian terakhir. Namun demikian upaya dari Jepang masih

belum dapat menyelesaikan isu *Comfort Women* yang menjadi penghambat harmonisme hubungan kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah

- Adeana, D. (2019). *Respon Penolakan Solidaritas Comfort Women Korea Selatan Terhadap Agreement on Comfort Women tahun 2015*. 1–117. <https://eprints.umm.ac.id/55160/>
- Adityani, F. D. (2018). Memori dan Trauma dalam Hubungan Internasional. *Journal of International Relations*, 24.
- Ariani, M. D. (2021). UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KOREA SELATAN DALAM KASUS. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 196.
- Britannica. (n.d.). *comfort women / Definition, History, & Facts /*. Retrieved September 26, 2021, from <https://www.britannica.com/topic/comfort-women>
- Dolgopol, U., & Paranjape, S. (1994). Comfort Women an Unfinished Ordeal. *International Commission of Jurists*. https://doi.org/10.1300/J152v03n02_07
- Dwi, M. (2021). *Upaya Penyelesaian Sengketa Korea Selatan Dalam Kasus Jugun Ianfu Tahun 1993-2020*. 191–192.
- Dyansa, C. S. (2018). *Kebijakan Jepang dalam Menyelesaikan Isu Comfort Women dengan Korea Selatan pada Tahun 2015*.
- Henson, M. R. (2017). *Comfort Woman: A Filipina's Story of Prostitution and 100 Slavery under the Japanese Military*.
- Japan Ministry of Foreign Affairs. (2021a). *Measures Taken by the Government of Japan on the Issue of "comfort women" / Ministry of Foreign Affairs of Japan*. <https://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/policy.html>
- Japan Ministry of Foreign Affairs. (2021b). *Ninth Periodic Report on the Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Responses to the List of Issues and Questions of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women) Government*.
- Lalitya, G. K. (2020). Analisis Sikap yang Diambil oleh Pemerintah Korea Selatan pada Masa Presiden Park Geun Hye Terkait dengan Isu Comfort Women. *Journal of*

International Relations, 6(4), 641.

- Lorentya, B. V. (2017). Keputusan Jepang Membayar Ganti Rugi Kepada "Wanita Penghibur" (IANFU) Korea Selatan Tahun 2015. *Skripsi : Universitas Negeri Jember*, 5.
- Mufidah, I. (2021). ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN. *Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 15.
- Nurika, R. R. (2017). Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi di Era Kontemporer. *Jurnal Sospol*, 3(1), 128.
- Prashernanda, H. (2019). *Dinamika Isu Comfort Womwn Hingga Munculnya Pergerakan Redress Movement for Comfort Women*.
- Putri, D. C. (2018). Penolakan Korban Comfort Women System Dari. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 75.
- Ratri, B. R., & Kurniawati, E. (2019). Sikap Jepang Terhadap Korea Selatan Terkait Agreement On Comfort Women 2015. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan*, 23(2), 400. <https://doi.org/10.31315/paradigma.v23i2.5016>
- Rhasintya, M. (2020). Analisis snyder dalam keputusan abstain Indonesia. *Journal of Government Science*, 113.
- Tanaka, Y. (2003). Japan's Comfort Women: Sexual slavery and prostitution during World War II and the US occupation. In *Japan's Comfort Women: Sexual slavery and prostitution during World War II and the US Occupation*. <https://doi.org/10.4324/9780203302750>
- V, C. (1996). The Strategic Context of the 1965 Korea—Japan Normalization Treaty. *Korean Studies*, 20, 123–160.
- Yamaguchi, T. (2020). *Japan 's Right-Wing Women and the " Comfort Women " Issue Tomomi Yamaguchi*. 6, 45–54.

Sumber Internet

- Asia Women Fund. (2017). *Digital Museum: The Comfort Women Issue and the Asian Women's Fund*.
<https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10310403/www.awf.or.jp/e->

[guidemap.html](#). Diakses pada 7 November 2022.

AWF. (n.d.). *Establishment of the AWF: How did the Comfort Women Issue come to light?* Retrieved from Asian Women Fund: <https://www.awf.or.jp/e2/survey.html>

Britannica. "Comfort Women | Definition, History, & Facts |." <https://www.britannica.com/topic/comfort-women>. Diakses pada 27 November 2022.

From Comfort Women Justice Coalition: <https://remembercomfortwomen.org/history-background/comfort-women-the-unresolved-history/#:~:text=The%20%E2%80%9CCo>.

Hosaka, Y. (2021, November 18). *Why Did the 2015 Japan-Korea 'Comfort Women' Agreement Fall Apart?* Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2021/11/why-did-the-2015-japan-korea-comfort-women-agreement-fall-apart/>

Japan Ministry of Foreign Affairs. (2021a). *Measures Taken by the Government of Japan on the Issue of "comfort women" | Ministry of Foreign Affairs of Japan*. <https://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/policy.html>. Diakses pada 27 November 2022.

McCoy, C. R. (2022, Agustus 13). *Fight About Comfort Women Statue Pits Two Community Again Each Other*. Retrieved from The Philadelphia Inquirer: <https://www.inquirer.com/news/comfort-women-statue-korean-japanese-dispute-arts-commission-20220813.html#:~:text=The%20%E2%80%9Ccomfort%20women%E2%80%9D%20statue%20was,over%20the%20Japanese%20wartime%20record>.